

PENGUJIAN PEMODERASI AZAS TRI PANTANGAN TERHADAP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA AKUNTABILITAS DANA DESA

Sri Ayem¹⁾, Lina Rahmawati^{2)*}

¹²⁾Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta
e-mail: sri.ayem@ustjogja.ac.id, lina017019.mhs@ustjogja.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa dengan Tri Pantangan sebagai variabel moderasi, Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di Kapanewon Playen. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan terdiri dari 13 desa. Teknik analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan tri pantangan tidak mampu memoderasi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa di desa-desa di Kapanewon Playen, akuntabilitas dana desa dapat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk memperhatikan partisipasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dana desa.

Kata kunci: Sistem informasi akuntansi, partisipasi masyarakat, Tri Pantangan, akuntabilitas dana desa

Abstract

This research aims to determine the effect of accounting information systems and community participation on village fund accountability with the Tri Pantangan as a moderating variable. This research was conducted in villages in Kapanewon Playen. The sample was selected using purposive sampling and consisted of 13 villages. Data analysis techniques use data quality tests, classical assumption tests, multiple regression tests, and hypothesis tests. The results of this research show that the accounting information system has a negative effect, community participation has a positive effect and the Tri Pantangan cannot moderate it. The implications of this research show that in villages in Kapanewon Playen, the accountability of village funds can be influenced by community participation. Therefore, the results of this research can be used as a consideration for increasing the accountability of village funds.

Keywords: Accounting information system, community participation, Tri Pantangan, accountability of village funds

1. PENDAHULUAN

Desa dijadikan sebagai dasar pokok dalam proses pembangunan NKRI, sebagaimana yang didefinisikan oleh UU No. 06 Tahun 2014 sebagai entitas hukum penduduk dengan batas daerah dan kewenangan untuk mengelola pemerintahan. Selain itu desa juga dapat mengelola kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan pada upaya inisiatif mereka sendiri, hak asal usul yang diakui, dan penghargaan terhadap hak-hak yang diturunkan dari generasi ke generasi berdasarkan norma-norma adat dan tradisi lokal yang diakui dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintah desa berwenang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdaya Masyarakat diolah untuk meningkatkan pembanunan dan kesejahteraan di wilayah perdesaan.

Pemerintah mengalokasikan dana desa sebagai bentuk penetapan anggaran dalam upaya meningkatkan pembiayaan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di level desa. Anggaran tersebut diperoleh dari dana yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Guna memastikan akuntabilitas dana desa, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang bertujuan untuk memastikan manajemen keuangan desa dijalankan dengan efisien dan bertanggungjawab. Regulasi ini dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 mengenai adminitrasi keuangan di tingkat desa, yang menjelaskan bahwa adminitrasi desa harus dikelola dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip terbuka, akuntabel, interaktif, dan dilaksanakan secara patuh dan teratur anggaran.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan setiap kegiatan secara transparan kepada pemerintah pusat dan masyarakat sebagai bagian integral dari kewajiban akuntabilitas (Ayem and Fitriyaningsih 2022). Penerapan akuntabilitas yang baik dapat membentuk manajemen pemerintahan optimal, meningkatkan mutu layanan kepada msyarakat, dan menghasilkan dampak signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab untuk memberikan laporan, menjawab pertanyaan, dan memberikan klarifikasi kinerja dan tindakan dari individu, entitas hukum, atau kepemimpinan oleh entitas yang memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan hal tersebut (Dina, 2020).

Peraturan perundang-undangan UU No. 06 Tahun 2014, istilah akuntabilitas merujuk pada prinsip bahwa setiap kegiatan dan hasil operasi pemerintah desa harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan akuntabilitas dalam suatu entitas dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mutu kinerja pemerintah desa, khususnya dengan tujuan mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akuntabilitas dana desa merupakan persoalan yang sejak dulu ada di pemerintah desa. Penyalahgunaan dana desa merupakan satu hambatan dalam mewujudkan transparansi penggunaan dana desa. Berdasarkan hasil observasi mengenai alokasi dana desa pada tahun 2020 yang diterima Kabupaten Gunungkidul dari pemerintah pusat meningkat dari Rp137 miliar menjadi Rp142 miliar. Direktur pemberdayaan masyarakat dan desa Gunungkidul, perlindungan anak, keluarga berencana dan dinas pemberdayaan masyarakat menjelaskan bahwa ada sedikit perbedaan alokasi dana desa untuk tahun 2020. Awalnya terdapat tiga kategori, yaitu alokasi dasar, alokasi formula, dan desa tertinggal. Saat ini, satu kategori telah dimasukkan, yaitu alokasi kinerja (Danar, 2020).

Akuntabilitas dana desa diharapkan dapat berjalan secara optimal, tetapi sering kali dana desa dikelola dengan cara yang tidak efisien. Dana desa menjadi peluang atau tempat bagi pihak-pihak tertentu di desa untuk melakukan penyimpangan. Penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi pernah terjadi di salah satu desa di Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, yang berakibat salah satu aparat desa ditetapkan sebagai tersangka kasus penyimpangan dana desa. Penyidik menemukan bukti keterlibatan individu terebut dalam tindak kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp 627 juta. Kasus tersebut menyebabkan sejumlah kepala desa menghadapi kendala dalam ranah hukum, karena sebagian aparat desa belum sepenuhnya memahami pengelolaan dan regulasi dana desa (Kurniawan, David, 2022). Dengan memperhatikan fenomena tersebut, peneliti

menyusun faktor-faktor kondisional, yang melibatkan pengaruh sistem informasi akuntansi dan partisipasi masyarakat.

Sistem Informasi Akuntansi menjadi suatu faktor dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas dana desa. Sistem informasi akuntansi adalah proses pencatatan dan penyusunan laporan yang terkoordinasi dengan baik, tujuan utamanya adalah memberikan informasi keuangan desa yang diperlukan oleh pemerintah setempat. Penerapan sistem informasi akuntansi dalam administrasi keuangan desa diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap tingkat akuntabilitas dana desa. Keefektifan sistem informasi akuntansi dapat mempengaruhi sistem akuntabilitas dana desa di wilayah tersebut (Muhammad Fadil 2020).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Polutu, Mattoasi, dan Usman (2022) menunjukkan kompetensi aparat desa, pengendalian internal, dan penerapan sistem informasi akuntansi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Polutu et al. (2022) sistem informasi akuntansi memiliki dampak negatif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sementara itu, secara parsial, sistem pengendalian internal memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor kedua yang mendukung akuntabilitas dana desa adalah partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi hal krusial yang dapat berdampak pada kesuksesan inisiatif pembangunan dan kemajuan perkembangan desa. Evaluasi mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan dan program berkelanjutan perlu dilakukan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dibatasi pada partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan, melainkan juga melibatkan kontribusi mereka untuk menemukan permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat. Akuntabilitas dana desa tidak dapat berhasil tanpa partisipasi dari masyarakat. Akuntabilitas dana desa memerlukan kerjasama yang positif dari seluruh pihak, termasuk pemimpin, perangkat desa, dan partisipasi dari masyarakat (Ayem dan Fitriyaningsih 2022). Dengan demikian, kenaikan tingkat partisipasi masyarakat akan berkontribusi pada peningkatan tingkat akuntabilitas dana desa. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anugrah, Prabowo, dan Wardani (2022) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat terwujud apabila mereka turut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan desa, karena penilaian masyarakat desa berpengaruh signifikan pada kinerja perangkat desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah dan penyusunan kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah berjalan dengan baik. Aktivitas partisipasi masyarakat yang konsisten dan semakin meningkat cenderung juga meningkatkan manajemen dana desa. Menurut hasil penelitian Putri & Maryono (2022), Atiningsih & Ningtyas (2019), Anugrah et al (2022), partisipasi masyarakat berdampak positif pada akuntabilitas dana desa, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Ayem and Fitriyaningsih (2022) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Tri Pantangan dalam azas Tamansiswa mencakup ketentuan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, tidak menyalahgunakan keuangan, dan tidak melanggar kesusilaan. Bagi aparatur desa khususnya kepala desa untuk dapat memberik contoh yang baik bagi bawahannya dan juga masyarakat dalam hal akuntabilitas dana desa (Wardani, Prihatni, dan Wulandari 2022). Menurut penelitian variabel moderasi yang berkaitan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara diharapkan sesuai dengan bagaimana pelaksanaan akuntabilitas dana desa di Kapanewon Playen.

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif

terhadap akuntabilitas dana desa (Anugrah, Prabowo, and Wardani 2022). Namun penelitian ini tidak sesuai dengan yang dihasilkan oleh Ayem dan Fitriyaningsih (2022), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel independen oleh peneliti, seperti Sistem Informasi Akuntansi, dan penambahan variabel moderasi, seperti Tri Pantangan, dan lokasi objek penelitian yang berbeda, dimana mengambil lokasi objek penelitian di Desa-desa Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul. Alasan dipilihnya lokasi objek penelitian tersebut karena sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi korelasi antara Sistem Informasi Akuntansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Dana Desa, serta menganalisis peran Tri Pantangan sebagai faktor moderasi dalam hubungan tersebut.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teory Stewardship

Teory Stewardship merupakan teori yang menjelaskan kondisi di mana seorang pemimpin tidak terdorong oleh motif individu, melainkan lebih menekankan dalam kepentingan keseluruhan organisasi. Teori ini berdasarkan psikologis dan sosiologis yaitu pemerintah desa sebagai (*steward*) yang bertindak sejalan dengan kepentingan masyarakat yang menjadi pihak utama. Pada intinya, instansi pemerintah tidak terfokus pada laba namun lebih mengarah pada layanan publik, oleh karena itu *teory Stewardship* tepat digunakan pada lembaga pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat sebagai (*principal*) (Sari 2021). Implikasi *Teory Stewardship* pada institusi pemerintahan (*steward*), institusi pemerintahan menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan sumber daya diemban oleh kepala Desa dan aparatur desa. Realisasi pertanggungjawaban dapat dicapai melalui penyediaan informasi secara rutin kepada masyarakat umum mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Tindakan ini merupakan cara pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan sumber daya dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh masyarakat (Ayem & Fitriyaningsih 2022).

Sistem Informasi Akuntansi

Delone & McLeod (2003) Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data dengan maksud menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi bertujuan untuk menjamin efektivitas dalam tata kelola dan penggunaan dana desa. Dalam konteks ini, sistem informasi akuntansi dapat dijelaskan sebagai sistem pencatatan dan penyusunan laporan yang terkoordinasi dengan baik, yang bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan desa yang diperlukan oleh pemerintah desa. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pengelolaan dana desa yang ada (Muhammad Fadil 2020). Sakti Anggoro Putra & Priono (2022) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan akuntabilitas dana desa karena pelaporan informasi keuangan dan Tingkat pertanggungjawaban yang tinggi terkait pengelolaan dana desa. yang berlaku.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen yang memengaruhi berhasil tidaknya program Pembangunan dan pengembangan masyarakat. Masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada setiap program pembangunan, tetapi juga aktif dalam mengenali permasalahan dan potensi yang ada di desa. Kegagalan pembangunan akan terjadi jika tidak ada keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan (Atiningsih & Ningtyas 2019). Pertanggungjawaban dana desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 Pasal 52 yang mengenai musyawarah desa. musyawarah desa merupakan forum yang dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk membahas berbagai aspek terkait pelaksanaan pemerintah desa, ditujukan agar masyarakat turut serta dalam proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan mereka juga diharapkan turut mengawasi pelaksanaan semua kebijakan pemerintah di lapangan. Tanpa pengawasan yang kuat dari masyarakat, risiko terjadinya penyimpangan berbagai bentuk dapat meningkat. Oleh sebab itu, pemahaman masyarakat mengenai proses pembentukan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi aspek yang krusial (Putra dan Rasmini 2019).

Tri Pantangan sebagai Value Ajaran Tamansiswa

Tri Pantangan dalam ajaran Ki Hadjar Dewantara merujuk pada tindakan-tindakan yang harus dihindari oleh seseorang yang menginginkan kesuksesan. Hal ini termasuk larangan untuk menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, menghindari penyalahgunaan keuangan, dan menjauhi pelanggaran terhadap kesusilaan (Wardani, Prihatni, & Wulandari 2022). Berdasarkan prinsip ajaran Tamansiswa, penyalahgunaan kekuasaan mengacu pada perilaku tidak jujur dari seseorang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu. Selain itu, terdapat larangan terhadap penyelewengan keuangan. Dalam hal ini uang seharusnya digunakan dengan bijak untuk meningkatkan kesejahteraan, dan tindakan korupsi tidak diperbolehkan. Selanjutnya, larangan untuk melanggar kesusilaan. Individu yang memiliki moralitas yang baik diharapkan untuk menghormati norma-norma tersebut dan menghindari perilaku curang. Tri Pantangan sangat penting untuk diterapkan sebagai panduan atau pedoman bagi individu dalam suatu kelompok. Hal ini bertujuan agar tetap mematuhi norma-norma dan menghindari terjadinya perilaku curang. Menurut Choirunnasih (2019) Konsep tri pantangan akan membimbing individu untuk berperilaku positif, memungkinkannya untuk mengontrol diri dan mematuhi norma-norma serta aturan yang berlaku. Hal ini juga mendorongnya untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan kesejahteraan bersama.

Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menunjukkan kinerja, sebagai bentuk individu, entitas hukum, atau kepemimpinan organisasi, kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban (Dina 2020). Akuntabilitas dijelaskan sebagai dasar yang menetapkan bahwa setiap tindakan dalam menjalankan pemerintahan desa harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi desa melakukan akuntabilitas yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mutu kinerja, terutama fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. berdasarkan pertanggungjawaban alokasi dana desa, kepala desa bertugas sebagai ketua penyelenggara yang memiliki tanggungjawab atas manajemen alokasi dana desa mulai dari tahap perencanaan hingga penyelenggaraan, termasuk pengawasan (Ayem dan Fitriyaningsih 2022).

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini, terdiri dari Aparatur desa di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. Sampel yang digunakan sebanyak 13 desa dan diambil 8 responden disetiap Desa. Sampel yang ada dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelaksana pengelolaan keuangan desa.

Sumber dan Teknik pengambilan sampel

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan dengan analisis data deskriptif yang yaitu menggunakan data primer digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji moderasi.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan didasarkan pada sumbernya yaitu menggunakan data primer. Data primer yang diolah secara langsung dengan objek dan masalah yang diteliti dari responden dengan menggunakan instrumen kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *non probability sampling*. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Analisis Data

Data yang dianalisis menggunakan program SPSS versi 22 dengan instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, selanjutnya menggunakan teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedstisitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis seta uji *Moderate Regression Analysis (MRA)*.

Distribusi Data

Tabel 1. Hasil Distribusi Frekuensi Sistem Informasi Akuntansi

Kategori	Rentang	Frekuensi	Presentase
Rendah	$x < 11$	12	12%
Sedang	$11 \leq x < 14$	81	81%
Tinggi	$x > 14$	7	7%

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi berikut dapat diketahui bahwa sistem informasi akuntansi berada pada kategori sedang. Tingkat kategori sedang pada presentase 81%.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Partisipasi Masyarakat

Kategori	Rentang	Frekuensi	Presentase
Rendah	$x < 25$	5	5%
Sedang	$25 \leq x < 32$	84	84%
Tinggi	$x > 32$	11	11%

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi berikut dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat berada pada kategori sedang. Tingkat kategori sedang pada presentase 85%.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Tri Pantangan

Kategori	Rentang	Frekuensi	Presentase
Rendah	$x < 12$	7	7%
Sedang	$12 \leq x < 14$	63	63%
Tinggi	$x > 14$	30	30%

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi berikut dapat diketahui bahwa tri pantangan berada pada kategori sedang. Tingkat kategori sedang pada presentase 63%.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Akuntabilitas Dana Desa

Kategori	Rentang	Frekuensi	Presentase
Rendah	$x < 24$	6	6%
Sedang	$24 \leq x < 28$	85	85%
Tinggi	$x > 28$	9	9%

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi berikut dapat diketahui bahwa akuntabilitas dana desa berada pada kategori sedang. Tingkat kategori sedang pada presentase 85%.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 5. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha >0,6	Validitas
1	Sistem informasi akuntansi	0,666	> 0,05 (valid)
2	Partisipasi masyarakat	0,758	> 0,05 (valid)
3	Tri pantangan	0,892	> 0,05 (alid)
4	Akuntabilitas dana desa	0,709	> 0,05 (valid)

Sumber: Pengolahan data, 2023

Uji Asumsi klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas pada penelitian ini, diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,143^c lebih besar dari *level of significant*, yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada model regresi yang diuji sudah berdistribusi normal.

Uji Multikolonieralitas

Berdasarkan hasil uji multikolonieralitas pada penelitian ini, diperoleh perhitungan nilai tolerance di atas masing-masing variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independent. Hasil perhitungan *Variance policy leniency (VIF)* pada masing-masing variabel memiliki nilai kurang dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieralitas antar variabel independent dalam model regresi.

Uji Heterokedasitas

Berdasarkan hasil heterokedasitas pada penelitian ini, diketahui bahwa nilai signifikan variabel sistem informasi akuntansi sebesar 0,057, variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,437, dan variabel tri pantangan sebesar 0,465. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	28,405	1,352		21,014	,000
Sistem informasi akuntansi	-,621	,053	-,751	-11,778	,000
Partisipasi masyarakat	,198	,043	,291	4,568	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji pada tabel tersebut, diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari kedua variabel dapat diartikan nilai konstanta (α) sebesar 28,405 menunjukkan jika kedua variabel independen konstan, nilai akuntabilitas dana desa rata-rata akan menjadi 28,405. Sedangkan koefisien untuk sistem informasi akuntansi (X1) adalah -0,621, yang menggambarkan bahwa setiap peningkatan satu nilai dalam nilai sistem informasi akuntansi

akan mengurangi nilai akuntabilitas dana desa sebesar -0,621, dan koefisien untuk partisipasi masyarakat (X2) adalah 0,198 yang menggambarkan bahwa setiap peningkatan satu nilai dalam partisipasi masyarakat akan menambah nilai akuntabilitas dana desa sebesar 0,198. Dengan demikian, sebagai contoh persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 28,405 - 0,621 X_1 + 0,198 X_2 + e.$$

Uji t

Berdasarkan hasil dari tabel 5, dapat dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil pengujian ini diketahui berdasarkan nilai t-hitung sebesar -11,778, sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 5% (0,05) adalah 1,984. Sedangkan, nilai signifikansinya adalah 0,000, yang menunjukkan bahwa lebih rendah dari 0,05 (0,000<0,05) yang menandakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas secara signifikan tetapi koefisien regresi bernilai negatif. Sehingga H₁ menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa tetapi H₁ **tidak terdukung**.

Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil pengujian hipotesis ini diketahui berdasarkan nilai t-hitung sebesar 4,568, sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 5% (0,05) adalah 1,984. Sedangkan, nilai signifikansinya adalah 0,000, yang menunjukkan bahwa lebih rendah dari 0,05 (0,000<0,05) yang menandakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa secara signifikan. Sehingga H₂ menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa, oleh karena itu H₂ **terdukung**.

Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	261,842	2	130,921	75,435	,000 ^b
Residual	168,348	97	1,736		
Total	430,190	99			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji f, diperoleh F-hitung sebesar 75,435 dan probabilitas sebesar 0,000. Karena sig F-hitung < 5% (0,000 < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,780 ^a	,609	,601	1,317

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji determinasi (R²) menunjukkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,601, yang menunjukkan bahwa variabel independen dalam

penelitian dapat mempengaruhi akuntabilitas dana desa sebesar 60,1%. Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini mempengaruhi 39,9% dari total.

Uji Moderate Regression Analysis (MRA)

Model 1

Tabel 9. Hasil Uji Moderate Regression Analysis (MRA)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	R Squard
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	6,426	15,426		,417	,678	
Sistem informasi akuntansi	1,155	1,248	,830	,926	,357	,103
Tri Pantangan	1,434	1,181	,967	1,214	,228	
X1.Z	-,081	,095	-1,059	-,850	,398	

a. Dependent Variable: Akuntabilitas dana desa

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji moderasi model 1, X1.Z terdapat nilai B sebesar -0,081 menunjukkan pengaruh yang bersifat negatif. Nilai ini melebihi 0,05 sebesar 0,398. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tri pantangan, sebagai variabel moderasi melemahkan hubungan antara sistem informasi akuntansi teradap akuntabilitas dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi tri pantangan tidak mampu memoderasi sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas dana desa.

Model 2

Tabel 10. Hasil Uji Moderate Regression Analysis (MRA)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	R Squard
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	15,001	19,874		,755	,452	,134
Partisipasi Masyarakat	,198	,679	,292	,291	,771	
Tri Pantangan	,558	1,486	,377	,376	,708	
X2.Z	-,004	,051	-,124	-,086	,932	

a. Dependent Variable: Akuntabilitas dana desa

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji moderasi model 2, X2.Z terdapat nilai B sebesar -0,004 menunjukkan pengaruh yang bersifat negatif. Nilai ini melebihi 0,05 sebesar 0,932. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tri pantangan, sebagai variabel moderasi melemahkan hubungan antara partisipasi masyarakat teradap akuntabilitas dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi tri pantangan tidak mampu memoderasi partisipasi Masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini dibuktikan dengan distribusi frekuensi data sistem informasi akuntansi berada pada kategori sedang sebanyak 81 data

dengan presentase 81% dari jumlah 100 data, nilai t-hitung sebesar -11,778, sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 5% (0,05) adalah 1,984. Sedangkan, nilai signifikansinya adalah 0,000, yang menunjukkan bahwa lebih rendah dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang menandakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas dana desa, tetapi koefisien regresi bernilai negatif. Sehingga H_1 menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas dana desa tetapi H_1 **tidak terdukung**. Sistem informasi akuntansi memberi pengaruh pada akuntabilitas dana desa, tetapi timbulnya akuntabilitas dana desa pada tiap-tiap desa tidak tergantung pada sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2021), Musdalifah (2020) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini dibuktikan dengan distribusi frekuensi data partisipasi masyarakat berada pada kategori sedang sebanyak 85 data dengan presentase 85% dari 100 data, nilai t-hitung sebesar 4,568, sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 5% (0,05) adalah 1,984. Sedangkan, nilai signifikansinya adalah 0,000, yang menunjukkan bahwa lebih rendah dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang menandakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa secara signifikan. Sehingga H_2 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa, oleh karena itu H_2 **terdukung**. Semakin baik partisipasi dari masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian Anugrah, Prabowo, & Wardani (2022), Rada Ratna, Annie, and Zul (2022), Sarah et al (2020), Putra & Rasmini (2019), Atiningsih & Ningtyas (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dana desa dipengaruhi positif oleh partisipasi Masyarakat.

Pengaruh Tri Pantangan dalam Memoderasi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

Hasil uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa Tri Pantangan melemahkan hubungan antara sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini dibuktikan dengan distribusi frekuensi data tri pantangan berada pada kategori sedang sebanyak 63 dengan presentase 63% dari 100 data, nilai t-hitung variabel model 1 sebesar -0,850, sedangkan t-tabel pada tingkat signifikansi 5% (0,05) sebesar 1,984, yang menunjukkan bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($-0,850 < 1,984$). Untuk nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,398 yang berarti lebih besar dari 0,05 ($0,398 > 0,05$), dan nilai *Understandarized Coefficients B* sebesar -0,081. Yang menunjukkan bahwa Tri Pantangan melemahkan hubungan antara sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas dana desa. Semakin tinggi nilai Tri Pantangan tidak dapat memperkuat hubungan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas dana desa. Sehingga H_3 dalam penelitian ini **tidak terdukung**. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian Ayem & Kusumasari, (2020) yaitu sistem pengendalian intern pemerintah memiliki dampak pada akuntabilitas, sementara sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kecurangan dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi.

Pengaruh Tri Pantangan dalam Memoderasi Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

Hasil uji hipotesis keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tri Pantangan melemahkan hubungan antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini dibuktikan dengan distribusi frekuensi data tri pantangan berada pada kategori sedang

sebanyak 63 dengan presentase 63% dari 100 data, nilai t-hitung variabel moderasi 2 sebesar -0,086 sedangkan t-tabel pada tingkat signifikansi 5% (0,05) sebesar 1,984 yang berarti t-hitung < t-tabel (-0,086 < 1,984). Sementara untuk nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,932 yang berarti lebih besar dari 0,05 (0,950 > 0,05), dan nilai *Understandarized Coefficients B* sebesar -0,004. Yang menunjukkan bahwa Tri Pantangan melemahkan hubungan Antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa. Semakin tinggi nilai tri pantangan tidak dapat memperkuat hubungan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa. Sehingga H₄ dalam penelitian ini **tidak terdukung**. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian Ayem & Kusumasari, (2020) yaitu sistem pengendalian intern pemerintah memiliki dampak pada akuntabilitas, sementara sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kecurangan dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas signifikan tetapi dilihat dari koefesien regresi bernilai negatif sehingga pengaruh sistem informasi akuntansi positif tetapi tidak terdukung.
2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa sehingga pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa terdukung.
3. Tri Pantangan memperlemah hubungan antara sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas dana desa sehingga Tri Pantangan sebagai pemoderasi hubungan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas dana desa tidak terdukung.
4. Tri Pantangan memperlemah hubungan antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa Sehingga Tri Pantangan sebagai pemoderasi hubungan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa tidak terdukung.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas, timbulnya akuntabilitas dana desa pada tiap-tiap desa tidak tergantung pada sistem informasi akuntansi, oleh karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar memperbanyak variabel independen lain yang mampu mempengaruhi akuntabilitas dana desa dan peneliti juga dapat mencari faktor lain yang mungkin mampu memoderasi sistem informasi akuntansi dan partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas dana desa. Selain itu, peneliti juga diharapkan memperluas cakupan objek penelitian mereka, dengan melakukan penelitian dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten atau Kota. Dikarenakan dalam penelitian ini akuntabilitas dana desa dapat dipengaruhi oleh partisipasi dari msyarakat. Maka hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan akuntabilitas dana desa agar lebih baik lagi ke depannya untuk semua Kantor Desa di Kecamatan Playen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Kathon Adi, Adia Adi Prabowo, and Dewi Kusuma Wardani. 2022. "Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Seluruh Kelurahan Di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal)." *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)* 6(2): 13–28.
- Atiningsih, Suci, and Aulia Cahya Ningtyas. 2019. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal

- Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* 10(1): 2015–19.
- Ayem, Sri, and Enti Fitriyaningsih. 2022. "Volume . 24 Issue 2 (2022) Pages 446-463 FORUM EKONOMI : Jurnal Ekonomi , Manajemen Dan Akuntansi ISSN : 1411-1713 (Print) 2528-150X (Online) Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Abstrak." 2(2): 446–63.
- Ayem, Sri, and Kirana Feby Kusumasari. 2020. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 10(2): 160.
- Choirunnasih. 2019. "Jurnal Ilmiah." *Jurnal Ilmiah* 10(2): 1–94.
- Danar. 2020. "2020, Dana Desa Untuk Gunungkidul Naik Jadi Rp 142 Miliar." *Krjogja.com*. <https://www.krjogja.com/gunungkidul/1242532877/2020-dana-desa-untuk-gunungkidul-naik-jadi-rp-142-miliar> (January 23, 2024).
- Dina, Naryati. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sunggal Dan Kecamatan Patumbak." *Ekonomi dan Bisnis*.
- Kurniawan, David, Abdul jalil. 2022. "Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Eks Lurah Getas Gunungkidul Langsung Ditahan Title." *Solopos.com*. <https://jogja.solopos.com/jaditersangka-korupsi-dana-desa-eks-lurah-getas-gunungkidul-langsung-ditahan-1408560> (January 23, 2024).
- Muhammad Fadil. 2020. "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4(3): 1668–88.
- Musdalifah. 2020. "Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon." *Jurnal Akuntansi*.
- Ningsih, Luh Putu Pratiwi Sintya 2021. 2021. "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Ubud)." *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan)*: 386–405.
- Polutu, Adriansah, Mattoasi Mattoasi, and Usman Usman. 2022. "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jambura Accounting Review* 3(2): 89–101.
- Putra, I Made Yoga Darma, and Ni Ketut Rasmini. 2019. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa." *E-Jurnal Akuntansi* 28: 132.
- Putri, Aulia Rakhma Larasati, and Maryono. 2022. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4(3): 1668–88.
- Rada Ratna, Sari, Mustika Putri Annie, and Azmi Zul. 2022. "Faktor-Aktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas." *JURNAL aKUNTANSI Dan Bisnis* 7(1): 46–59.
- Sakti Anggoro Putra, Bima, and Hero Priono. 2022. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4(11): 4825–36.

- Sarah, Siti, Taufeni Taufik, and Devi Safitri. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu." *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4(4): 330–42. <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>.
- Sari, Padnyawati. 2021. "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan)." *Hita Akuntansi dan Keuangan* (21): 544–62.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.**
- Wardani, Dewi Kusuma, Yuli Prihatni, and Ayu Wulandari. 2022. "Pengaruh Pemahaman TRI Pantangan Tamansiswa, Sikap Moral Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Niat Melakukan Penyelewengan Pajak." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8(2): 212–19.
- WH, Delone, and Mclean ER. 2003. 19 *Journal of Management Information Systems The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. Journal of management of Informaton Systems.*
- Kurniawan, David, A. jalil 2022. *Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Eks Lurah Getas Gunungkidul Langsung Ditahano.* Diakses dari <https://jogja.solopos.com/jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-eks-lurah-getas-gunungkidul-langsung-ditahan-1408560> (Solopos.com)
- Danar. 2020. *2020, Dana Desa untuk Gunungkidul Naik Jadi Rp 142 Miliar.* Diakses dari <https://www.krjogja.com/gunungkidul/1242532877/2020-dana-desa-untuk-gunungkidul-naik-jadi-rp-142-miliar> (Krjogja.com)